

**ANALISIS PENGARUH
INFLASI DAN NILAI TUKAR
RUPIAH ATAS DOLAR TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TAHUN 2014-2016
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK CANDISARI KOTA
SEMARANG)**

Diah Yuliana, Marhamah, Sutrisno
Program Studi Manajemen STIE SEMARANG
Program Studi Akuntansi STIE SEMARANG
Program Studi Akuntansi STIE SEMARANG

ABSTRACT

Tax avoidance is the setting to minimize or eliminate the tax burden by considering the tax consequence thereof. Tax avoidance is not a violation of tax laws for business taxpayers to reduce, avoid, minimize or alleviate the tax burden is done in a way that made possible by the Tax Act.

This study aims to empirically examine the influence of Institutional Ownership, Percentage Board of Commissioners Independent, Total Board of Commissioners, Quality Audit, Audit Committee, and the size of the Company to the Company's Tax Avoidance listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010 - 2012. The population in this study is a manufacturing company that is listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010 - 2012. The samples were selected using purposive sampling method in order to obtain as much as 72 issuers.

The results of this study indicate that the Institutional Ownership, Quality Audit, Audit Committee and significant effect on Tax Avoidance. While the percentage of Independent Commissioner, Number of Board of Commissioners, and the size of the Company no significant effect on Tax Avoidance. Coefficient of determination (Adjusted R Square) of 0.347. This means that the variable Institutional Ownership, Percentage Board of Commissioners Independent, Total Board of Commissioners, Quality Audit, Audit Committee and Company Size, 34.7% have a role together to be able to explain or describe variables Tax Avoidance.

Keywords : *Tax Avoidance, Institutional Ownership, Percentage Board of Commissioners Independent, Total Board of Commissioners, Quality Audit, Audit Committee, and the size of the Company.*

ABSTRAK

Penghindaran pajak adalah pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan konsekuensi pajaknya. Penghindaran pajak bukanlah pelanggaran undang-undang perpajakan agar pembayar pajak usaha mengurangi, menghindari, meminimalisir atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Kepemilikan Institusional, Persentase Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris, Mutu Audit, Komite Audit, dan besarnya Perseroan atas Penghindaran Pajak Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 - 2012. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 - 2012. Sampelnya dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan sebanyak 72 emiten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Institutional Ownership, Quality Audit, Komite Audit dan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan persentase Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris, dan ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,347. Artinya, variabel Kelembagaan Kepemilikan, Persentase Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris, Mutu Audit, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan, 34,7% memiliki peran bersama untuk dapat menjelaskan atau mendeskripsikan variabel Penghindaran Pajak.

Kata kunci : Penghindaran Pajak, Kepemilikan Kelembagaan, Persentase Dewan Komisaris Independen, Jumlah Dewan Komisaris, Mutu Audit, Komite Audit, dan ukuran Perusahaan.

Pendahuluan

Penerimaan perpajakan dalam APBN adalah sumber penerimaan terbesar Negara dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). PPN merupakan pengganti Pajak Penjualan karena karena dirasakan sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan. PPN juga memiliki kelebihan menghilangkan pajak berganda, menggunakan tarif tunggal yang memudahkan pelaksanaannya, netral dalam persaingan dalam negeri, netral dalam perdagangan internasional, netral dalam pola konsumsi dan dapat mendorong ekspor (Mardiasmo, 2008:273).

Mengingat begitu besar dan pentingnya penerimaan perpajakan dalam membiayai pembangunan, maka diperlukan untuk menjaga meningkatkannya melalui faktor internal dan eksternal. Karena fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi kestabilan penerimaan pajak. Fluktuasi ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia seperti krisis finansial global menyebabkan menurunnya kinerja perekonomian dunia secara drastis. Krisis tersebut dikarenakan adanya

krisis likuiditas yang terjadi di Amerika Serikat memberikan dampak pada perekonomian global termasuk Indonesia.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia merosot tajam. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan ditransmisikan ke dalam turunnya penerimaan pajak. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sasaran pembangunan ekonomi yang dapat terwujud akan membantu pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan ekonomi, terdapat indikator ekonomi makro yang harus dijaga seperti yang terdapat dalam penelitian, yaitu stabilitas indikator ekonomi inflasi dan nilai tukar rupiah (Departemen Keuangan 2008:1-3).

Indikator ekonomi yang pertama adalah inflasi, inflasi merupakan kenaikan tingkat harga keseluruhan (Case dan Fair, 2004:58). Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian berbagai Negara termasuk Indonesia adalah inflasi, terutama untuk tingkat inflasi yang lebih tinggi. Inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor/impor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan dan penerimaan pajak (Nersiwad, 2002).

Indikator yang kedua adalah nilai tukar rupiah, menurut Murni (2006 : 244), nilai tukar rupiah (*exchange rate*) atau sering disebut juga kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Ketika nilai tukar rupiah melemah akan mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. Upaya pengendali fluktuasi rupiah, pemerintah sebaiknya memperhatikan berbagai faktor yang teridentifikasi kiranya alasan kuat juga datang dari faktor non ekonomi, yaitu faktor politik, keamanan dan tegaknya hukum yang telah memberikan bobot tersendiri dalam melemahkan nilai tukar rupiah ini. Oleh karena itu, tidak ada salahnya pemerintah juga memusatkan perhatian pada

terciptanya iklim politik, situasi keamanan dan penegakan hukum yang lebih kondusif (Edalmen, 2000).

Kajian Teoritis

1. Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar (kurs) adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau dikemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.

Dalam sistem pertukaran dinyatakan oleh yang pernyataan besaran jumlah unit yaitu “ mata uang “ (harga mata uang atau sarian mata uang) yang dapat dibeli dari 1 penggalan “ unit mata uang “ (dasar mata uang). Sebagai contoh, dalam penggalan disebutkan bahwa kurs EUR-USD adalah 1,4320 (1,4320 USD per EUR) yang berarti bahwa penggalan mata uang adalah dalam USD dengan penggunaan penggalan nilai dasar tukar mata uang adalah EUR.

Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217IDR. Secara tidak formal, orang Indonesia juga menyebut mata uang ini dengan namaperak. Satu rupiah dibagi menjadi 100sen, walaupun inflasi telah membuatnya tidak digunakan lagi kecuali hanya pada pencatatan di pembukuan bank.

Apabila suatu negara mengalami inflasi, maka bisa diidentifikasi bahwa harga barang mahal, maka untuk memenuhi kebutuhan akan barang/jasa negara tersebut akan melakukan kegiatan impor dari suatu negara. Kegiatan impor membutuhkan valuta asing. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Sistem nilai tukar sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu kurs tetap, mengambang terkendali, dan mengambang bebas. Valuta asing atau mata uang asing adalah alat pembayaran luar negeri. Jika kita mengimpor mobil dari Jepang, kita dapat membayarnya dengan yen. Yen bagi kita merupakan valuta asing. Apabila kita membutuhkan valuta asing, kita harus menukarkan rupiah dengan uang asing yang kita butuhkan. Perbandingan nilai mata uang asing dengan mata uang dalam negeri (rupiah) disebut kurs.

Adapun macam-macam kurs yang sering ditemui di bank atau tempat penukaran uang asing (*money changer*).

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut *Value Added Tax* (VAT) atau *Goods and Services Tax* (GST). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10%. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN

Salah satu kendala yang banyak dialami oleh berbagai negara dalam perekonomian adalah masalah inflasi, terlebih jika yang terjadi tingkat inflasi tinggi. Inflasi mempengaruhi seluruh variabel makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, impor/ekspor, penabungan, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan dan penerimaan pajak (Nersiwad, 2002). Tingkat inflasi berpengaruh terhadap daya konsumsi masyarakat, dimana konsumsi itu berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi konsumsi maka semakin tinggi pula penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi.

Tingkat inflasi akan mempengaruhi harga Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), dimana dasar pengenaan PPN merupakan harga perolehan

dari BKP dan JKP. Tarif yang dikenakan terhadap PPN adalah sepadan, yaitu 10% dari harga perolehan. Hal tersebut membuat inflasi berpengaruh penerimaan PPN, sebagai contoh harga sebuah barang “Y” sebelum terjadi inflasi sebesar Rp 1.000.000,- yang mana dikenakan PPN sebesar Rp 100.000,-. Periode berikutnya dengan inflasi yang meningkat harga barang “Y” naik menjadi Rp 1.100.000,- dan dikenakan PPN menjadi Rp 110.000,-.

Penelitian yang dilakukan oleh Salawati (2008) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dkk. (2009) serta Locarno dan Staderini (2008) juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

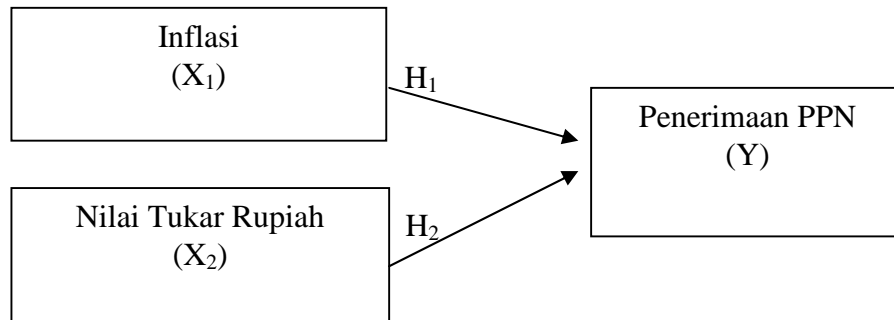
4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap PPN

Sasaran pembangunan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan ditranmisikan ke dalam turunnya penerimaan pajak. Upaya untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi adalah dengan menjaga stabilitas indikator-indikator ekonomi makro yang salah satu diantaranya adalah indikator ekonomi makro nilai tukar rupiah (Departemen Keuangan, 2008:1-3).

Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sementara tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi.

Penelitian yang dilakukan oleh Salawati (2008) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Suryowibowo (2005) menunjukkan bahwa kurs berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka diekspetasikan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Metodologi

Variabel Penelitian

- a. Variabel dependen atau variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2002:63). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN yang dilambangkan dengan Y. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPN BM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN yang terutang dihitung dengan cara :

PPN yang terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

- b. Variabel Variabel bebas (Independen) merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Sugiyono, 2010). Yang menjadi variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini adalah

1. Inflasi adalah kenaikan harga tingkat keseluruhan (Case dan Fair, 2004:58). Menurut Murni (2006:41), laju inflasi adalah laju tingkat harga umum dari tahun ke tahun dan dan biasanya diikuti dengan kenaikan harga pada tahun tertentu dari tahun sebelumnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau (*consumer price index-CPI*) mengukur biaya sekelompok barang dan jasa di pasar. Laju atau tingkat inflasi dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Laju Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{(t-1)}}{\text{IHK}_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

IHK_t = Indeks Harga Konsumen tahun x

IHK_(t-1) = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya

2. Nilai tukar (*exchange rate*) atau disebut juga kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Menurut Mankiw (2007:128-135), kurs nominal adalah harga relatif dari mata uang dua Negara, sedangkan kurs riil adalah harga relatif dari barang-barang diantara dua Negara. Rumus untuk menghitung kurs riil terdiri dari kurs riil untuk barang tunggal dan kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas:

- a. Kurs riil untuk barang tunggal

$$\text{Kurs Riil} = \frac{\text{Kurs Nominal} \times \text{Harga Barang Domestik}}{\text{Harga Barang Luar Negeri}}$$

- b. Kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas

$$\epsilon = e \times (P / P^*)$$

- c. Kurs nominal

$$e = \epsilon \times (P^* / P)$$

Keterangan:

€ = Kurs Riil

e = Kurs Nominal

P/P* = Rasio Tingkat Harga

P = Tingkat Harga Luar Negeri (Dollar)

P* = Tingkat Harga Domestik

Populasi Dan Penentuan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itulah definisi populasi dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan jumlah populasi 36 buah. Populasi terdiri dari orang atau makhluk hidup serta benda-benda yang akan dipelajari yang meliputi semua karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki obyek dan subyek tersebut.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. dan sampel pada penelitian ini adalah 36 sampel. Jika populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh yang ada di populasi, hal seperti ini dikarenakan adanya keterbatasan dana atau biaya, tenaga dan waktu, maka oleh sebab itu peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diambil dari buku, jurnal, majalah, penelitian terdahulu dan situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Data kuantitatif berupa data angka-angka yang terdapat pada data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs www.bps.go.id dan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan diperoleh melalui situs.

Metode Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk menguji dan mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujiannya meliputi: Uji Normalitas, Uji Autokolerasi, Uji Multikolonieritas dan Uji Heteroskedastisitas.

b. *Goodnes Of Fit Model* (Uji Kelayakan Model)

1. Uji layak model (Uji Statistik f)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan cocok atau tidak.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada dasarnya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

c. Analisis Regresi

d. Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t)

e. Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen, secara individual, dalam menerangkan variasi variabel dependen

Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Dekripsi Objek Penelitian

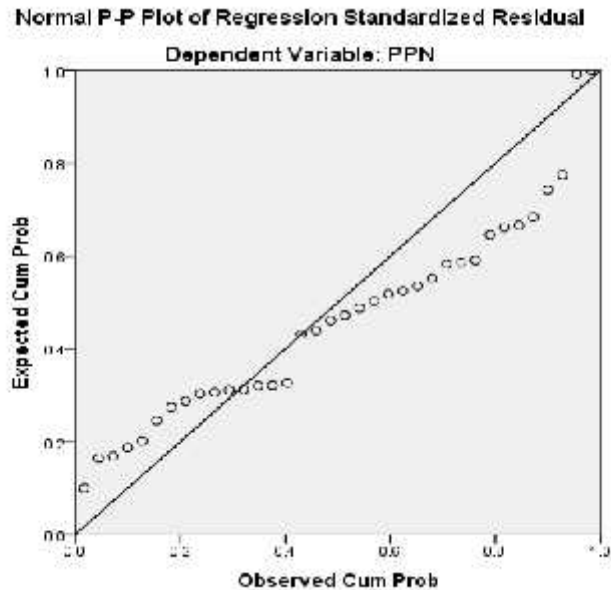
Populasi dalam penelitian ini adalah inflas dan nilai tukar rupiah dari tahun 2014 sampai dengan 2016 di kantor KPP Semarang Candiasri. Inflasi dan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh terhadap PPN.

Pemilihan Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai populasi dalam penelitian ini adalah dengan alasan bahwa DJP sebuah direktorat jendral dibawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perpajakan. Struktur organisasi Kantor Pusat DJP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 131/PMK.01/2006 terdiri dari 1 Seketariat, 12 Direktorat dan 1 Pusat yang dipimpin oleh pejabat eselon II. Unit kerja vertikal di daerah meliputi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Saat ini terdiri dari 31 Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia yang dipimpin pejabat eselon II A (www.wikipedia.com). Berdasarkan struktur organisasi dari Kantor Pusat DJP yang mencakup seluruh Indonesia, maka penelitian ini menganalisis mengenai penerimaan PPN secara nasional.

- 2. Pengujian Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas ini memiliki tujuan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Gambar 2
Uji Normalitas



Berdasarkan tampilan grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dapat diketahui bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal, demikian juga pada grafik *normal probability plot* terlihat bahwa titik – titik data berada di sekitar garis diagonal dan bergerak mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini sudah memenuhi asumsi normalitas.

- b. Uji Autokorelasi

Salah satu cara untuk menguji ada atau tidak autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Bila nilai DW terletak antara batas bebas atas (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol atau tidak ada autokorelasi

2. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol atau autokorelasi positif
3. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol atau autokorelasi negatif
4. Bila nilai DW terletak antara batas bebas atas (du) dan batas bawah (dl) serta terletak antara 4-du dan 4-dl, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Bila ternyata didalam model regresi diketahui terdapat autokorelasi, maka harus diobati dengan menambah variabel lagi. Berikut adalah hasil Output dari uji autokolerasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
Hasil Uji *Autokorelasi*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.504 ^a	.254	.208	16.92105	1.513

a. Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi

b. Dependent Variable: PPN

Uji *autokorelasi* merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri, artinya bahwa nilai variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. Berdasarkan ketentuan uji autokolerasi dimana nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$ tidak terjadi autokorelasi, dengan diketahui nilai D-W sebesar 1.513 dari tabel 4.3 maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokolerasi dalam model regresi.

c. Uji *Multikoleniaritas*

Uji *multikolonieritas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. *Multikolonieritas*

dapat dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Ghozali (2011) mengatakan bahwa nilai VIF multikoloneritas adalah kurang dari 10 dan tolerance mendekati 1. Berikut hasil perhitungan menggunakan program SPSS:

Tabel 2
Hasil Uji Multikoleniaritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Inflasi	.901	1.110
Kurs	.901	1.110

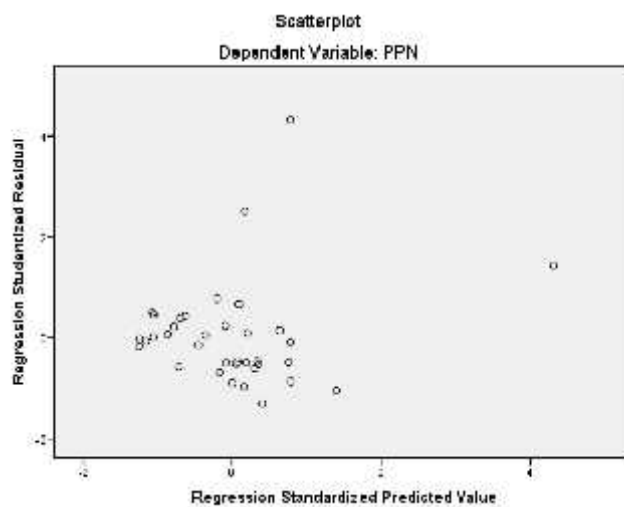
Dari tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance 0,1 dan nilai VIF 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

d. Uji *Heteroskedastisitas*

Uji *heterokedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut *homokedastisitas* dan jika berbeda disebut *heteroskedastisitas*. Model regresi yang baik adalah *homoskedastisitas* atau tidak terjadi *heterokedastisitas*.

Gambar 3

Uji Heterokedastisitas



Pada gambar diatas menunjukkan bahwa titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

3. Uji f

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan cocok atau tidak (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil uji F:

Tabel 3
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3209.533	2	1604.767	5.605	.008 ^b
Residual	9448.622	33	286.322		
Total	12658.156	35			

a. Dependent Variable: PPN
b. Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi

Hasil uji kelayakan pada tabel di atas, didapat F hitung sebesar 5.605 dengan tingkat signifikan sebesar 0,008 (lebih kecil dari 0,05). Oleh karena tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa metode dalam penelitian ini merupakan model yang fit.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model pada Variabel Bebas (X) dalam menerangkan Variabel Terikat (Y).

Tabel 4.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.504 ^a	.254	.208	16.92105	1.513

a. Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi
b. Dependent Variable: PPN

Dari tabel diatas, angka koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,208. Hal ini berarti bahwa variabel Kurs dan Inflasi mempunyai peranan 20,8% secara bersama-sama untuk dapat menjelaskan atau

menerangkan variabel Penerimaan PPN. Sedangkan sisanya sebesar 79,2% (100% - 20,8%) dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi Penerimaan PPN.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis linier berganda:

Tabel 5.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-54.815	45.470	
1 Inflasi	-.004	.001	-.437
Kurs	9.945	3.725	.423

Dari hasil analisis dengan program SPSS tersebut, maka dapat diketahui persamaan regresi dari penelitian ini. Adapaun persamaan regresi linier yang terbentuk adalah:

$$Y = -54,815 - 0,004 \text{ Inflasi} + 9,945 \text{ Kurs}$$

6. Hasil pengujian Hipotesis

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing – masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 6.
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-54.815	45.470		-1.206	.237
1 Inflasi	-.004	.001	-.437	-2.758	.009
Kurs	9.945	3.725	.423	2.670	.012

a. Pengujian Hipotesis 1

Dari tabel diatas, nilai t-hitung Inflasi (X₁) adalah sebesar -2,758 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,009. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi (X₁) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Pengujian Hipotesis 2

Dari tabel diatas, nilai t-hitung Kurs (X_2) adalah sebesar 2,670 dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kurs (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Pengaruh Inflasi terhadap PPN

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Adwin Surja Atmadja (2002), Adisetiawan (2009), Anak Agung Gde Aditya Krisna, Ni Gusti Putu Wirawati (2013) dan Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat, Bayu Kaniskha (2016) dan Dwi Nuraeni (2011). Hal ini dikarenakan jika terjadi kenaikan tingkat inflasi akan mempengaruhi harga jual barang dan jasa dimana harga jual barang dan jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Terjadinya kenaikan tingkat inflasi akan mengakibatkan harga jual barang dan jasa juga akan meningkat yang berarti DPP PPN juga meningkat. Meningkatnya DPP PPN akan berpengaruh langsung terhadap besarnya penerimaan PPN yang juga akan meningkat.

2. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap PPN

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Adwin Surja Atmadja (2002), Adisetiawan (2009), Anak Agung Gde Aditya Krisna, Ni Gusti Putu Wirawati (2013) dan Almira Herna Renata, Kadarisman Hidayat, Bayu Kaniskha (2016) dan Dwi Nuraeni (2011). Hal ini dikarenakan 70% bahan baku produksi Indonesia yang masih mengandalkan impor, jika terjadi depresiasi nilai tukar rupiah akan mengakibatkan lebih banyak jumlah rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan satu dollar. Karena lebih banyak rupiah yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu dollar, maka harga bahan baku produksi impor yang harus dibayar oleh Indonesia akan menjadi lebih mahal yang secara otomatis akan meningkatkan jual barang dan jasa di masyarakat. Harga jual barang dan jasa yang mengalami peningkatan di masyarakat akan berpengaruh terhadap penurunan daya konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pula terhadap penurunan penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa.

Kesimpulan

1. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.
2. Kurs berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima.

Daftar Pustaka

Annisa, Nuralifmida Ayu dan Lulus Kurniasih. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012: 95-189.